

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data dan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa model oposisi yang diadopsi PSI pada pemerintahan Anies Baswedan pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Model oposisi yang diadopsi oleh PSI adalah oposisi spesifik, yakni oposisi yang bertujuan mengoreksi atau melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan tertentu tanpa menolak rezim, para pemimpin, maupun kebijakan utama yang dikeluarkan pemerintahan. Artinya oposisi tidak bermaksud untuk mengubah tatanan sistem negara, menolak kebijakan utama pemerintahan maupun menentang individu Gubernur. Melainkan tetap pada koridornya dalam melaksanakan tugas dan fungsi legislatif. Dalam model ini dapat dicontohkan pada kasus Formula E dan Anggaran pembelian Lem Aibon serta Pulpen.

Pertama, Formula E. Sikap oposisi ini dibuktikan dengan PSI yang menolak dan menggunakan hak interpelasinya sebagai bagian legislatif di DPRD DKI Jakarta. Terlihat dari terburu-burunya penyelenggaraan Formula E yang tidak ada urgensinya di tengah masalah Covid-19. Mengingat penyelenggaraan Formula E tidak ada dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Kemudian, uang yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan event ini sampai triliunan. Uang tersebut merupakan milik warga Jakarta yang harus dipertanggungjawabkan.

Kedua, anggaran lem aibon dan pembelian pulpen yang PSI yang mencapai nilai 200 Miliar lebih. PSI melakukan penyisiran anggaran yang bernilai fantastis tersebut karena merupakan bagian fungsi dari legislatif. Transparansi anggaran yang dilakukan pemerintahan Anies Baswedan terkait dana-dana besar ini patut dipertanyakan. Anggaran dengan total 200 Miliar tersebut tidak wajar jika digunakan untuk pembelian dua barang tersebut yang akan berjumlah sangat banyak. Walaupun pada akhirnya BPK menilai keuangan DKI dengan cap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah peneliti paparkan di atas, berikut beberapa saran dalam penelitian ini:

6.2.1 Saran Teoritis

Pada penelitian ini, fokus kajiannya adalah menganalisis tujuan dalam kritik yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia di dalam parlemen terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Anies Baswedan pada periode 2017-2022 untuk mengetahui model oposisi PSI terhadap pemerintahan Anies Baswedan. Saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah bagaimana terjadinya proses pengkajian kebijakan sehingga PSI bisa mengambil sebuah sikap penolakan atau penerimaan dalam sebuah kebijakan.

6.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan analisis data yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti sarankan kepada pemerintahan Anies Baswedan dan para pemegang kekuasaan daerah maupun negara harap untuk memegang teguh prinsip transparansi, karena prinsip inilah yang PSI tekankan ketika mengikrarkan diri sebagai oposisi di DKI Jakarta untuk mendapatkan serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang sedang berkuasa.

